

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.



Wiranata, I Gede A.B., 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Tesis

Mulyana, Pelanggaran-Pelanggaran yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sehingga Berimplikasi Akta Kehilangan Keotentikannya, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

Kusumo, Agung Dhani, Penerapan Sanksi etik Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan di Kabupaten Sleman, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Angraini, Ria Tri, “Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kota Tangerang Selatan”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Safitri, Eliza, “Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Promosi jabatan di Kota Pekanbaru”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2013.

Atmojo, Yoseph Bambang Dwi, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta”. *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2013.

C. Jurnal

Kartiko, Heni, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Noatris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, Universitas Kanjuhuran, Malang: *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

Khalid, Muhammad, “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017.

Priyambodo, Yogi, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga”, Universitas UNISSULA, Semarang: *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, September 2017.

Purwaningsih, Endang, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, Universitas YASRI, Jakarta: *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, Februari 2015.

Supriyanta, “Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris”, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta: *Yutisia*, Vol. 2, No. 3, September-Desember 2013.

Suryani, Anik, “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik”, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: *Jurnal Repertorium*, Vol.III, No. 2, Juli-Desember 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Kode Etik Notaris Perubahan Tahun 2015

E. Internet

<http://www.karokab.go.id/id/profil/peta-daerah> diakses pada tanggal 13/05/2018, pukul 16.53 WIB.



Ismiati D.Rahayu, “ Harga Diri Notaris : 1 Akta, Sepiring Nasi Rendang”
<http://www.medianotaris.com> diakses tanggal 10 Agustus 2018

Pieter Latumeten, “Ketegorisasi kepalsuan formal dan materil dari akta notaris yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana”,
<http://www.indonesianotarycommunity.com> , diakses pada 14 Agustus 2018.

NNP, “Catat Notaris Dikawal Dua Lembaga Etik” ,
<http://www.hukumonline.com> diakses pada pukul 21.26 WIB, tanggal 12 Maret 2018

Norman Edwin Elnizar, “Kemenhumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan” <http://www.hukumonline.com> diakses pada 22 Juni 2018.